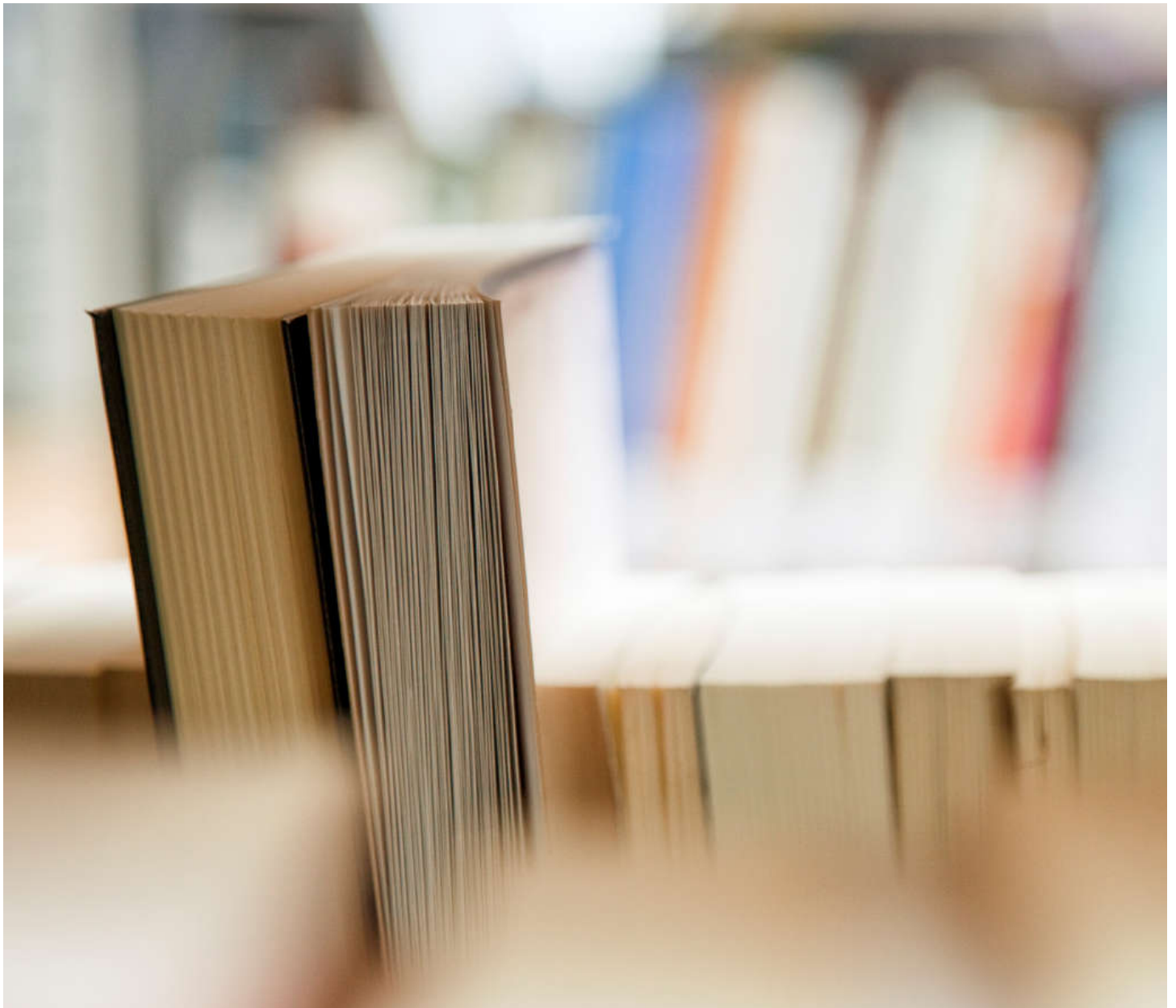




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar kepada masyarakat (stakeholders) pada Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan atas dasar Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2021– 2026.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis selama Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang mudah, cepat, ramah dan transparan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Blitar, 15 Februari 2024
KERAJAAN REPUBLIK INDONESIA
KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

EXECUTIVE SUMARY

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal membantu Walikota mencapai visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital” dan **Misi 5** “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar 2021-2026 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah:

No	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat tercapai seluruhnya, sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	385,06	229,5%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,66)	101%

Untuk mencapai target kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP didukung oleh anggaran sebesar Rp. 8.817.011.113 dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	385,06	229,5%	1.199.965.117	1.171.901.490	97,7%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,66)	101%	7,617.045.996	7.461.795.194	98%

Dari capaian realisasi kinerja dan anggaran tersebut, terdapat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	229,5%	97,7%	2,35
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101%	98%	1,03

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Dasar Hukum	6
E. Aspek-Aspek Strategis	8
F. Isu-Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2021-2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	12
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022- 2023	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun s.d akhir Periode Renstra	18
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	
B. Akuntabilitas Keuangan	19
1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	19
2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	20
3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
C. Prestasi/Penghargaan	
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Langkah Perbaikan	22

Lampiran:

- Matrik Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), yang dapat diketahui tingkat akuntabilitasnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD dan Perjanjian Kinerja (PK). dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran 2023 yang disempurnakan dengan dokumen perubahan Perjanjian Kinerja. Dokumen LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar serta sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kinerja dan kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kererausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

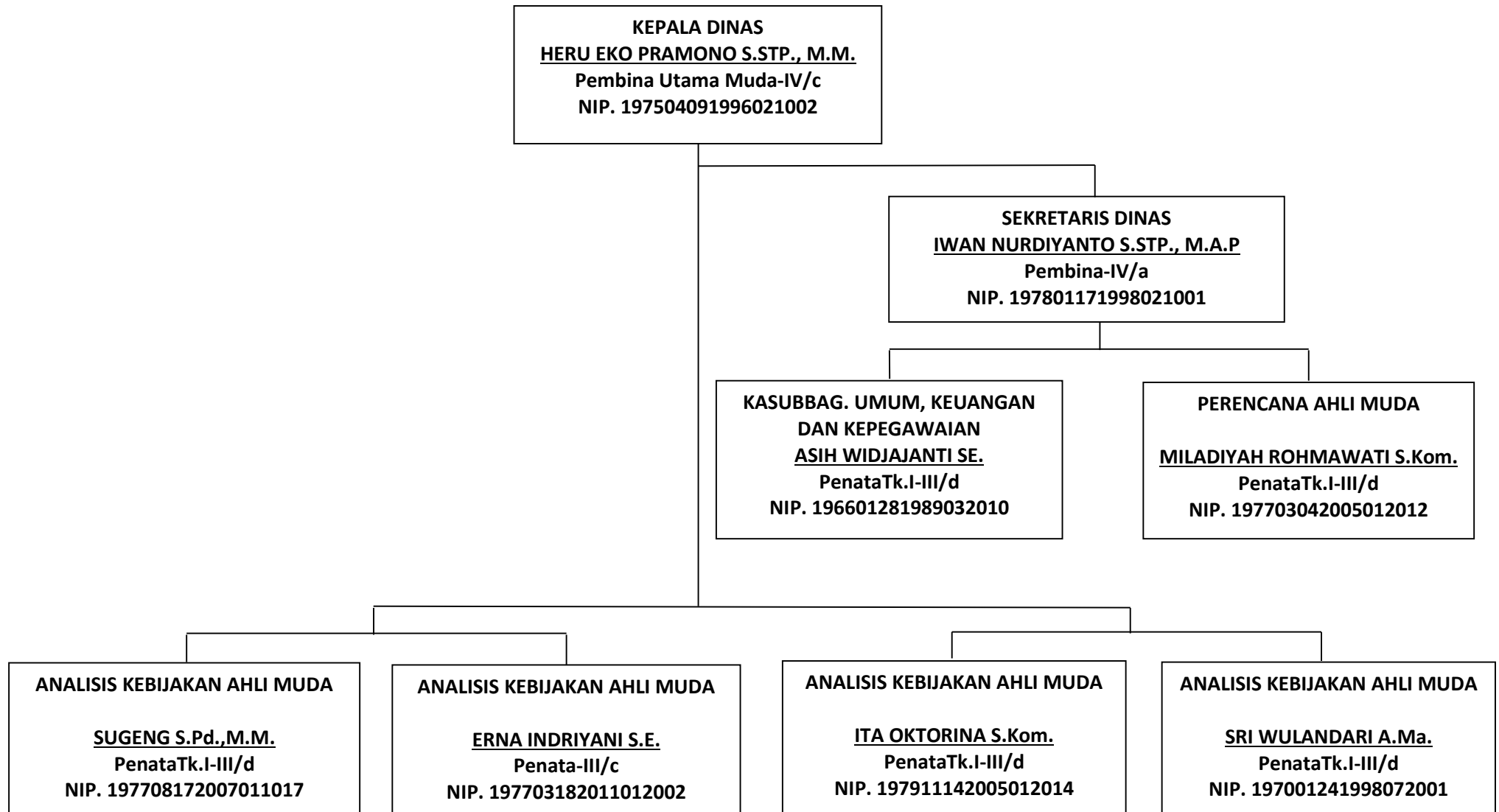
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang ASN dan Non ASN. Adapun penggolongan pegawai adalah berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Berdasarkan Pangkat/Gol., Tingkat Pendidikan dan Jabatan Tahun 2023

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin			Ket
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-	
3	Pembina (IV/a)	1	-	1	
4	Penata Tk. I (III/d)	3	5	8	
5	Penata (III/c)	-	-	-	
6	Penata Md Tk I (III/b)	-	-	-	
7	Penata Muda (III/a)	3	2	5	
8	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2	
9	Pengatur (II/c)	1	4	5	
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	
11	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1	
12	-	15	4	19	THL

	Jumlah	26	16	42	
	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	3	-	3	
2	Sarjana (S1)	9	8	17	
3	Diploma	2	5	7	
4	SLTA	11	3	14	
5	SLTP	1	-	1	
6	SD	-	-	-	
	Jumlah	26	16	42	
	Jabatan				
1	Pejabat Struktural	2	1	3	
2	Pejabat Fungsional	2	4	6	
3	Pelaksana / Staff	22	11	33	
	Jumlah	26	16	42	

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Blitar



C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
- 24.** Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar: merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. DPMPTSP mendukung Kota Blitar menuju Smart City dalam aspek ekonomi, khususnya pada pengembangan perda insentif dan kemudahan penanaman modal yang didukung oleh aplikasi SIMIJIN dan layanan penunjang Bagasigra serta Jempol Lisa yang menjadi Quick Win/Rencana Tahunan Smart city.
3. DPMPTSP mendukung Reformasi Birokrasi Tematik “Peningkatan Realisasi Investasi”.

F. Isu-Isu Strategis

Tema pembangunan RKPD Kota Blitar tahun 2023 adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui normalisasi ekonomi daerah dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mendukung tema pembangunan tersebut adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dengan membangun sarana pelayanan (mall pelayanan publik).
- 2) Meningkatkan promosi penanaman modal melalui event daerah yang melibatkan pelaku usaha Kota Blitar maupun luar Kota Blitar.
- 3) Meningkatkan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
- 4) Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan.
- 5) Meningkatkan penyebaran informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Sebagaimana amanat pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa *Perangkat daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD*. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, RENSTRA juga merupakan dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, wajib menyusun rencana strategis. RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2021-2026, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Walikota serta

didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan urusan Penanaman Modal (termasuk didalamnya pelayanan perizinan) mendukung pencapaian visi dan misi Walikota, yaitu Misi 3 dan Misi 5. Pada sasaran strategis “Meningkatnya jumlah realisasi investasi” mendukung **Misi 3** “Berdikari Secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”, pada **Tujuan 2** “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi”, **Sasaran 1** “Meningkatnya nilai investasi daerah”. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” mendukung **Misi 5** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi” pada **Tujuan 1** “Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi”, **Sasaran 7** “Meningkatnya tata kelola perangkat daerah”

Untuk mencapai Sasaran RPJMD Kota Blitar dan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP maka ditetapkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	• Optimalisasi identifikasi potensi investasi • Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi • Peningkatan promosi investasi • Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Matriks renstra 2021-2026 sebagaimana terlampir.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (84,8)

Didukung oleh 5 program, yaitu:

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	370,248,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	531,946,876.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Program Promosi Penanaman Modal	191,069,741.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106,700,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,617,045,996.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja berupa:

- Hasil (*outcome*), bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- Keluaran (*output*), bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja merupakan sebuah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja sasaran strategis yang didukung kegiatan perangkat daerah, sesuai target kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	385,06	229,5%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daeah	A (84,8)	A (85,66)	101%

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

a) Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi

Realisasi investasi dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pada setiap tribulan melalui aplikasi OSS (On-line Single Submission) oleh para pelaku usaha di Kota Blitar. Walaupun masih ada sebagian pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM, namun capaian realisasi investasi yang diperoleh merupakan gambaran umum kondisi penanaman modal di Kota Blitar. Tahun 2023 realisasi investasi Kota Blitar adalah 385,06 milyar rupiah atau sebesar 229,5% dari target 167,8 milyar rupiah. Jumlah tersebut meningkat 11,54% dibanding tahun 2022 yang sebesar 345,22 milyar rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan perekonomian di Kota Blitar setelah masa krisis akibat pandemi covid19 berjalan dengan baik.

Berikut disajikan tabel realisasi investasi tahun 2022 - 2023 menurut bidang usaha:

Tabel 3.2
Data Realisasi Investasi Tahun 2022 dan 2023

NO	BIDANG USAHA	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
		UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12	155,200,000	0	10	75.500.000	1
2	Pertambangan dan Penggalian	19	85,500,000	7	0	0	0
3	Industri Pengolahan	222	4,682,489,711	95	325	11.846.977.144	181
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	6	359,619,239	0	3	50.000.000	3
5	Treatment Air, Treartmen Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0	2	0	0
6	K o n s t r u k s i	346	33,072,722,417	163	411	43.908.678.367	189
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	577	196,033,876,172	545	842	226.675.715.271	1228
8	Pengangkutan dan Pergudangan	46	768,759,996	0	46	6.145.190.087	5
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	37	3,668,089,440	13	96	5.444.613.000	170
10	Informasi dan Komunikasi	61	1,649,296,774	45	55	26.530.796.322	102
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0
12	Real Estate	4	7,370,860,000	4	9	1.052.894.296	9
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	77	3,323,862,759	12	118	1.677.750.000	18
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	118	168,764,700	5	170	2.706.700.000	55

NO	BIDANG USAHA	REALISASI TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2023		
		UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp)	TK (Orang)
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0
16	P e n d i d i k a n	2	60,000	0	79	2.641.523.373	369
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	21	93,248,216,609	131	39	55.700.376.276	81
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1	194,166,934	23	6	10.000.000	2
19	Aktivitas Jasa Lainnya	43	440,190,000	2	51	588.600.000	11
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1592	345,221,674,751	1045	2262	385.055.314.136	2424

Realisasi investasi tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 11,54%. Peningkatan terdapat pada bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan jumlah investasi terbesar dari PT. Hariputra Santosa Jaya Rp. 64.919.813.820 dan PT. Mahapura Jaya Sakti Rp. 40.347.637.439. Bidang usaha kedua pada bidang jasa konstruksi dari PT. Modern Makmur Mandiri Rp 30.673.740.522.

Pada tahun 2023 juga masuk investor-investor baru diantaranya adalah PT. HANJAYA MANDALA dan PT. GUDANG GARAM di bidang usaha Industri Sigaret Kretek Tangan dengan jumlah investasi sebesar Rp 456.475.610.781 dan Rp 24.889.000.000.

Capaian jumlah realisasi investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

➤ Faktor pendukung:

- 1) Kegiatan usaha mulai stabil setelah bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid19, dengan indikator pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) sebanyak 3919 unit, baik pendaftaran baru maupun pembaharuan/perbaikan.
- 2) Bimtek LKPM bagi para pelaku usaha sehingga pelaporan LKPM menjadi lebih tertib.
- 3) Layanan perizinan yang CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Adil) dan sarana prasarana yang memadai.

➤ Faktor penghambat:

- 1) Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line.
- 2) Belum ada regulasi/kebijakan pemberian insentif bagi investor.
- 3) Promosi potensi investasi belum optimal.
- 4) Belum semua pelaku usaha mempunyai NIB, terutama pelaku usaha mikro kecil.

➤ Tindak lanjut yang dilaksanakan:

- 1) Pengembangan aplikasi SIMIJIN.
- 2) Penyusunan Naskah Akademis pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
- 3) Peningkatan promosi investasi.
- 4) Sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB.

b) Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja perangkat daerah yang diperoleh dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat

Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada Tahun 2023 memperoleh predikat A (Memuaskan) dengan nilai 85,66. Nilai tersebut meningkat 0,19 dari tahun 2022 (85,47). Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

✚ Faktor pendukung:

- Pengembangan kompetensi bagi sdm yang membidangi.
- Dukungan pimpinan dalam melaksanakan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	167,8	345,22	385,06
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (84,85)	A (85,47)	A (85,66)

Realisasi investasi tahun 2023 meningkat 11,5% dari tahun 2022 atau sebesar 39,84 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di kota Bitar semakin kondusif, yang ditandai dengan masuknya beberapa investor yaitu PT. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA dan PT. GUDANG GARAM yang bergerak di bidang usaha Industri Sigaret Kretek Tangan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	843	730,28	86,63%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,1)	A (85,66)	100,7%

Target realisasi investasi pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah Rp 843.000.000.000 dan telah tercapai 86,63% pada tahun II Renstra (tahun 2023), sehingga diperkirakan target pada akhir renstra dapat tercapai. Sedangkan untuk Nilai SAKIP perangkat daerah (85,66) telah melampaui target akhir renstra (85,1).

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		
		Kota Blitar	Kabupaten Blitar	Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	385,06	2.928,2	145.000,1

Realisasi investasi Kota Blitar hanya 13,15% dari realisasi investasi Kabupaten Blitar. Sebab Kabupaten Blitar memiliki potensi investasi (sumber daya alam) yang lebih banyak dan beragam karena didukung oleh luas wilayahnya. Luas wilayah Kota Blitar jauh lebih kecil dibanding luas wilayah Kabupaten Blitar yaitu 32 km²:1.589 km² (luas Kota Blitar hanya 2% dibanding luas wilayah Kabupaten Blitar).

Ditingkat provinsi, Kota Blitar menyumbang 0,3% (sama seperti pada tahun 2022) dari realisasi investasi Provinsi Jawa Timur. Kecil memang, karena Kota Blitar merupakan kota kecil kedua (setelah Kota Mojokerto) di Jawa Timur dan tidak memiliki kawasan industri.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	1.199.965.117	13,6%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.617.045.996	86,4%
Total anggaran		8.817.011.113	100%

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi” didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.199.965.117 atau 13,6% dari keseluruhan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP. Sedangkan sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” didukung oleh anggaran sebesar Rp. 7.617.045.966 atau 86,4% termasuk didalamnya Penyediaan gaji dan tunjangan asn Rp. 2.867.569.407 serta pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik Rp 3.354.089.541.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	385,06	229,5	1.199.965.117	1.171.901.490	97,7
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	50	124,71	249	106.700.000	105.719.520	99,1
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	45	45,2	100	191.069.741	190.537.350	99,7
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,5	99,71	100,2	531.946.876	525.068.176	98,7
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	75	75,7	100,9	370.248.500	350.576.444	94,7
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,66)	101	7.617.045.996	7.461.795.194	98
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,2	84,65	100,53	7.617.045.996	7.461.795.194	98
Total Anggaran					8.817.011.113	8.633.696.684	97,9

Sasaran Strategis “Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi” didukung oleh 4 (empat) program, yaitu:

(1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja program adalah Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi, dihitung dari peningkatan jumlah pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) tahun 2023 dibanding tahun 2022 dengan rumus perhitungan :

$$\rightarrow \frac{\text{Jumlah NIB tahun 2023} - \text{Jumlah NIB tahun 2022}}{\text{Jumlah NIB tahun 2022}} \times 100\%$$

→ Informasi data:

- Jumlah NIB tahun 2022 = 1744
- Jumlah NIB tahun 2023 = 3919

$$\rightarrow \text{Realisasi kinerja} \rightarrow \frac{3919 - 1744}{1744} \times 100\%$$

$$\rightarrow \mathbf{124,71\%}$$

Faktor pendukung tercapainya kinerja adalah layanan jemput bola kepada masyarakat yang dikemas dalam inovasi **Jempol Lisa**, yang dilaksanakan di Kelurahan Gedog dan Plosokerep pada acara bersih desa serta di lokasi pangkalan lpg bagi pedagang eceran lpg.

(2) Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja program adalah Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah informasi potensi investasi yg dipromosikan th 2023} - \text{Jumlah informasi potensi investasi yg dipromosikan th 2022}}{\text{Jumlah informasi potensi investasi yg dipromosikan th 2022}} \times 100\%$$

→ Informasi data:

Jumlah informasi potensi investasi yg dipromosikan th 2023=212

Jumlah informasi potensi investasi yg dipromosikan th 2022=146

$$\rightarrow \text{Realisasi kinerja} = 45,2\%$$

(3) Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja program adalah Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP, dengan rumus perhitungan: Jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah izin terbit kali 100%.

Informasi data:

- Jumlah izin terbit sesuai SOP = 7517 izin
- Jumlah izin terbit = 7537 izin

Realisasi kinerja → 99,71%

Faktor pendukung tercapainya kinerja adalah:

- ✓ SDM yang berkompeten dan memiliki komitmen serta tanggungjawab kepada masyarakat.
- ✓ Sarana prasarana perkantoran yang memadai
- ✓ Koordinasi yang baik dengan tim teknis

(4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja program adalah Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan tertib pelaporan LKPM th 2023} - \text{Jumlah perusahaan tertib pelaporan LKPM th 2022}}{\text{Jumlah perusahaan tertib pelaporan LKPM th 2022}} \times 100\%$$

Informasi data:

- Jumlah perusahaan tertib pelaporan LKPM th 2023 = 362 unit
- Jumlah perusahaan tertib pelaporan LKPM th 2022 = 206 unit

Realisasi kinerja → $\frac{(362-206)}{206} \times 100\%$
→ 75,7%

Realisasi kinerja yang tercapai dipengaruhi oleh:

- ✓ Bimtek LKPM kepada pelaku usaha yang dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan total jumlah peserta 300 orang pada tahun 2023.
- ✓ Pendampingan pelaporan LKPM.

Untuk realisasi anggaran program dapat tercapai diatas 95% kecuali Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang tercapai 94,7%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	229,5	97,7	2,35
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101	98	1,03
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		165,25	97,85	1,69

Atas realiasi kinerja dan anggaran yang telah dicapai, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 2,35% dan 1,03%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

✚ Faktor pendorong kinerja:

- ✓ Kegiatan usaha yang mulai stabil setelah pemulihan pasca pandemi covid-19.
- ✓ Bimtek dan pendampingan LKPM.
- ✓ Layanan perizinan yang mudah dan cepat disertai sarana prasarana yang memadai.

✚ Faktor pendorong anggaran adalah pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal

C. Prestasi/Penghargaan

- ✓ Penyelenggara Pelayanan Publik kategori **Sangat Baik** (penilaian dari Ombudsmen) Tahun 2023.
- ✓ DPMPSTSP juga berkontribusi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan PTSP atas penggunaan anggaran Tahun 2023. Oleh karena itu perlu ditetapkan sasaran strategis sebagai indikator keberhasilan kinerja yang dilaksanakan. Berikut adalah sasaran strategis (target dan realisasi) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP tahun 2023:

1. Meningkatnya jumlah realisasi investasi



Realisasi investasi tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 229,5%.

2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah



Dalam upaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja, DPMPTSP berhasil memperoleh predikat “**A**” dengan nilai hasil evaluasi 85,66, meningkat 0,19 dari tahun sebelumnya.

B. SARAN

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (Tahap II) dan Launching	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√		
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	√		√
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota			
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	√		√
5	Meningkatkan regulasi penanaman modal	Menyusun perda pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	√		
6	Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line	Pengembangan aplikasi SIMIJIN	Program/kegiatan tercover di dinas teknis (Diskominfotik)	√		√

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, semoga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Blitar, 15 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Lampiran A

Matrik Rencana Strategis
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023		K	Rp		
						K	Rp				
Meningkatnya nilai investasi daerah			Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun N - Jumlah realisasi investasi tahun N-1/ Jumlah realisasi investasi tahun N-1 x 100%	-37,15%	0,36%		2,08%			
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berjalan	84,8 (A)	84,8 (A)		85,1 (A)			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	83,33 (Baik)	84,2 (Baik)	4.776.576.000	85,1 (Baik)	20.588.473.000	DPMPTSP	Kota Blitar
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun X 100%	100%	100%	11.899.212	100%	19.215.212		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokume n	3	1.450.655	12	6.283.655		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	3 Laporan	3	10.448.557	12	12.931.557		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	100%	100%	2.971.311.590	100%	15.383.960.590		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	29 org/ bulan	26	2.970.311.615	104	15.375.399.615		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD pada tahun berjalan	1 Laporan	1	999.975	4	8.560.975		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	100%	100%	258.339.349	100%	996.148.349		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	29 stel	3 paket	58.390.400	9 paket	196.199.400		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	2 publikasi	200 org	199.948.949	800 org	799.948.949		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia x100%	100%	100%	228.200.677	100%	1.350.617.677		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2 kompon en	1 paket	2.461.644	4 paket	11.306.644		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakanpada tahun berjalan	19 unit	4 paket	73.642.069	16 paket	272.250.069		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakanpada tahun berjalan	13 macam	3 paket	5.824.850	12 paket	26.514.850		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakanpada tahun berjalan	327 dos	14 paket	22.224.000	60 paket	435.991.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakanpada tahun berjalan	4 macam	1 paket	14.487.046	4 paket	146.892.046		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan pada tahun berjalan	2 bahan bacaan	12 dokume n	5.400.000	48 dokume n	38.502.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	103 rakor	25 laporan	104.161.068	100 laporan	419.161.068		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yg tersedia sesuai kebutuhan/ Jumlah BMD penunjang urusan yg dibutuhkan x 100%	100%	100%	1.029.227.441	100%	1.161.727.441		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yg disediakan	Jumlah paket mebel yg disediakanpada tahun berjalan	paket	1 paket	10.275.000	6 paket	65.275.000		
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg disediakanpada tahun berjalan	unit	2 unit	18.952.441	8 unit	96.452.441		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yg disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yg disediakanpada tahun berjalan	0	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan x 100%	100%	100%	380.400.000	100%	1.255.401.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakanpada tahun berjalan	4 macam	36 laporan	105.000.000	144 laporan	450.000.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanpada tahun berjalan	NA	39 Laporan	275.400.000	156 laporan	805.401.000		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	BMD yang terpelihara sesuai standar/BMD yang terpelihara x100%	100%	100%	84.497.300	100%	608.702.300		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannyapada tahun berjalan	10 unit	10	60.035.100	40 unit	308.283.100		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharapada tahun berjalan	3 macam	42 unit	24.462.200	168 unit	90.664.200		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasipada tahun berjalan	1 unit	0	-	3	190.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yg dipelihara/ direhabilitasipada tahun berjalan	-	0	-	3 unit	19.755.000		
	Meningkatnya jumlah realisasi investasi		Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah) pada tahun berjalan	167,1 (milyar rupiah)	167,8		843			
		Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N - Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 / Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 x 100%	0	50%	352.000.000	65%	1.517.165.000	DPMPTSP	Kota Blitar
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan pada tahun berjalan	NA	1	30.229.000	4 dokume n	500.929.000		
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada tahun berjalan	NA	0	-	3 dokume n	248.260.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah pada tahun berjalan	NA	1	30.229.000	4 kegiatan usaha	252.669.000		
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia pada tahun berjalan	1 dokume n	0	-	3	694.465.000		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	1 dokume n	0	-	3	347.564.000		
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	NA	0	-	3	346.901.000		
		Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N - Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1/ Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1 x 100%	NA	45%	970.060.000	60%	4.181.079.000	DPMPTSP	Kota Blitar
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	Jumlah potensi informasi yang dipromosikan/ Jumlah potensi informasi yang ada x100%	NA	100%	970.060.000	100%	4.181.079.000		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang disusun	NA	1	970.060.000	4 dokume n	4.181.079.000		
		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N - Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 /Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 X 100%	0	75%	483.400.000	85%	2.083.518.500	DPMPTSP	Kota Blitar
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM pada tahun berjalan	NA	100	372.021.000	475	1.972.139.500		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan	NA	6	21.285.000	26 kegiatan usaha	1.278.967.750		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan	72 perusah aan	200	233.954.986	920	385.229.236		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pada tahun berjalan	NA	6	116.781.014	26 kegiatan usaha	307.942.514		
		Program Pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Jumlah izin terbit tepat waktu/ Jumlah izin yang diterbitkan * 100%	98,4%	99,5%	679.543.000	99,7%	2.800.802.000	DPMPTSP	Kota Blitar
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	Pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N - pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 / pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 x100%	NA	3,0%	399.266.333	4,0%	2.520.525.333		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tahun berjalan	NA	1.060	90.587.696	4.494 orang	691.581.696		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					Data Awal	2023					
						K	Rp	K	Rp		
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal pada tahun berjalan	3300 izin	3860	253.123.632	16.271 pelaku usaha	1.385.062.632		
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu pada tahun berjalan	3 pengadu an	4	55.555.005	14	443.881.005		
		Total Jumlah Anggaran					7.261.579.000		31.171.037.500		

Lampiran B

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,36	Meningkatnya jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	50%	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha	106.700.000
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	45%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	191.069.741
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75%	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	6 kegiatan usaha	36.348.500
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	300 Pelaku Usaha	259.134.240

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6 kegiatan usaha	74.765.760
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	99,5 %	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3%	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1060 Pelaku Usaha	162.729.594
													Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	3860 Kegiatan Usaha	313.662.277

N O	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Orang	55.555.005
2	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,2 Indeks	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.450.655
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.448.557
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.866.569.407

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	999.975
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	58.468.750
													Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Orang	85.712.600
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.461.644
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.729.709

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5.824.850
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	22.224.000
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.487.046
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.400.000
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	214.145.926
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	183.104.050
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	66.087.656

NO	TUJUAN			SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
													Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.358.005.551
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	120.516.000
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	397.800.000
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	88.147.220
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	24.462.400

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**

Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi	Jumlah Realisasi Investasi	170.20 (Milyar Rupiah)
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.85(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	370,248,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	531,946,876.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	191,069,741.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	106,700,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,617,045,996.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil


 Walikota Blitar,
DR. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kota Blitar

HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197504091996021002

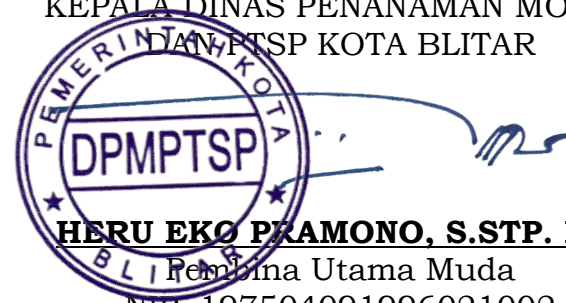
Lampiran D

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
1	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,8	385,06	229.5%		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106.700.000	105.719.520	99,1	
								Program Promosi Penanaman Modal	191.069.741	190.537.350	99,7	
								Program Pelayananan Penanaman Modal	531.946.876	525.068.176	98,7	
								Program Pengendalian Penanaman Modal	370.248.500	350.576.444	94,7	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.617.045.996	7.461.795.194	98	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi	%	KET
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,8)	A (85,66)	100						

Blitar, 18 Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002